

AL-IFFAH

Journal of Islamic Sciences Research

Research Article

Implementasi Hukum Zakat Mal Dalam Sistem Ekonomi Politik Islam

Tatha Amelia Fretika¹, Lailatul Fitria², M Firdaus Tri Kuncoro³, Mashudi⁴

1. Universitas Trunojoyo Madura; 220721100118@student.trunojoyo.ac.id
2. Universitas Trunojoyo Madura; 220721100143@student.trunojoyo.ac.id
3. Universitas Trunojoyo Madura; 220721100152@student.trunojoyo.ac.id
4. Universitas Trunojoyo Madura; mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 10, 2024
Accepted : January 23, 2025

Revised : December 05, 2024
Available online : February 03, 2025

How to Cite: Tatha Amelia Fretika, Lailatul Fitria, M Firdaus Tri Kuncoro, & Mashudi. (2025). Implementation of Zakat Mal Law in the Islamic Political Economic System. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(1), 17-24. <https://doi.org/10.61166/iffah.v1i1.3>

Implementation of Zakat Mal Law in the Islamic Political Economic System

Abstract. Implementation of zakat mal law in the Islamic economic system is an effort to realize social and economic justice. Zakat mal is an obligation for Muslims who have certain wealth, and its collection and distribution are regulated by sharia principles. In the context of Islamic economics, zakat mal plays a role as an instrument to reduce economic disparities, overcome poverty, and strengthen social solidarity. The process of implementing zakat mal involves zakat institutions that are responsible for collecting and distributing the zakat. Transparency and accountability are key in running this system, by ensuring that zakat funds are distributed in accordance with sharia provisions to support the welfare of the community. In addition, the government has a role in creating regulations that support the practice of zakat mal, providing incentives for companies and individuals who contribute significantly. Implementation of zakat mal law also requires education for the community

so that understanding of the importance of zakat as an integral part of the Islamic economic system increases. Thus, zakat mal can be an effective instrument to achieve the goals of Islamic economics, namely justice, balance, and the welfare of the community as a whole.

Keywords: Zakat Mal, Islamic Economic System, Implementation, Social Justice, Social Solidarity.

Abstrak. Implementasi hukum zakat mal dalam sistem ekonomi Islam adalah suatu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Zakat mal merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kekayaan tertentu, dan pengumpulan serta distribusinya diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat mal berperan sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan memperkuat solidaritas sosial. Proses implementasi zakat mal melibatkan lembaga-lembaga amil zakat yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tersebut. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjalankan sistem ini, dengan memastikan bahwa dana zakat disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah untuk mendukung kesejahteraan umat. Selain itu, pemerintah memiliki peran dalam menciptakan regulasi yang mendukung praktik zakat mal, memberikan insentif bagi perusahaan dan individu yang berkontribusi secara signifikan. Implementasi hukum zakat mal juga memerlukan edukasi kepada masyarakat agar pemahaman mengenai pentingnya zakat sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Islam semakin meningkat. Dengan demikian, zakat mal dapat menjadi instrumen efektif untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Zakat Mal, Sistem Ekonomi Islam, Implementasi, Keadilan Sosial, Solidaritas Sosial.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam menciptakan landasan bagi sebuah masyarakat yang berkeadilan dan seimbang, di mana nilai-nilai agama menjadi pedoman utama dalam aspek kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah kewajiban membayar zakat, yang di antaranya mencakup zakat mal. Implementasi hukum zakat mal dalam konteks sistem ekonomi Islam menjadi sebuah tantangan dan peluang untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pertama-tama, penting untuk memahami esensi zakat mal dalam Islam. Zakat mal merupakan kewajiban bagi individu yang memiliki kekayaan tertentu, dan jumlahnya ditentukan berdasarkan ketentuan syariah. Kontribusi ini tidak hanya berupa tindakan keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang mampu meretas ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan demikian, implementasi zakat mal bukan sekadar aspek teologis, melainkan juga strategi ekonomi yang memiliki dampak signifikan.¹

Dalam melaksanakan hukum zakat mal, peran lembaga amil zakat menjadi sangat krusial. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat mal sesuai dengan ketentuan syariah. Transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat menjadi kunci keberhasilan

¹Suherman, D. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui badan amil zakat nasional kabupaten Garut tahun 2019. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 67-76.

dalam menjalankan fungsi mereka, sehingga dana zakat dapat disalurkan dengan tepat sasaran untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan.

Pemerintah juga memegang peran vital dalam mengimplementasikan hukum zakat mal. Dengan merumuskan regulasi yang mendukung praktik zakat mal, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku ekonomi, termasuk perusahaan dan individu, untuk berkontribusi secara aktif dalam membayar zakat mal. Insentif yang diberikan oleh pemerintah dapat menjadi dorongan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi.

Selain itu, edukasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan implementasi zakat mal yang efektif. Pemahaman masyarakat mengenai urgensi dan manfaat zakat sebagai instrumen ekonomi yang dapat menciptakan keadilan sosial perlu ditingkatkan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih aktif dalam membayar zakat mal dan memastikan bahwa kontribusi mereka benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi, implementasi hukum zakat mal juga perlu disesuaikan dengan dinamika zaman. Penelitian dan inovasi dalam sistem pengumpulan dan distribusi zakat mal dapat memastikan bahwa mekanisme ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek teologis, ekonomis, dan sosial, implementasi hukum zakat mal dalam sistem ekonomi Islam diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Dengan memastikan bahwa zakat mal dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan efisiensi, sistem ekonomi Islam dapat menjadi model alternatif yang mempromosikan keadilan, solidaritas sosial, dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelajahi secara mendalam implementasi hukum zakat mal dalam konteks ekonomi Islam, mengeksplorasi peran berbagai pihak terkait, dan menganalisis dampaknya terhadap struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat dalam Islam

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat fundamental dalam kehidupan seorang Muslim. Secara bahasa, zakat berarti "membersihkan" atau "menumbuhkan," yang mencerminkan tujuan dari pelaksanaan zakat, yaitu membersihkan harta dari sifat kikir dan menumbuhkan kesejahteraan bagi umat. Dalam Islam, kewajiban membayar zakat didasarkan pada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menetapkan bahwa setiap Muslim yang memiliki kekayaan melebihi nisab wajib menunaikan zakat². Al-Qur'an secara jelas menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat dalam berbagai ayat, salah satunya adalah dalam Surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, "Dan mendirikan salat dan menunaikan zakat" (QS. Al-Baqarah: 177). Zakat bukan hanya sekadar ibadah pribadi, tetapi juga

² Ahmad, M. "The Role of Zakat in Islamic Economics," *Journal of Islamic Economic Studies*, 12, no. 3 (2020): 45-67.

menjadi kewajiban sosial yang memiliki dampak besar dalam mewujudkan keadilan sosial

Zakat mal merupakan alat untuk redistribusi kekayaan di kalangan umat Islam, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara yang kaya dan miskin (Ahmad, 2020). Salah satu aspek yang sangat penting dalam zakat mal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang wajib menunaikannya. Harta yang dikenakan zakat haruslah harta yang telah mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang disyaratkan untuk dikenakan zakat. Nisab zakat mal berbeda-beda tergantung jenis hartanya, misalnya untuk emas, nisabnya adalah 85 gram emas. Jika seseorang memiliki kekayaan yang memenuhi nisab ini, maka zakat mal sebesar 2,5% dari total kekayaan harus dibayarkan setiap tahun. Zakat dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar kewajiban individu. Melalui zakat, harta yang terkumpul tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi juga disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

B. Zakat Mal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat mal memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Dalam ekonomi Islam, zakat dianggap sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Prinsip dasar ekonomi Islam menekankan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi kekayaan, yang tercermin dalam kewajiban zakat. Zakat tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta individu, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi umat dengan memastikan kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja³

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga merupakan mekanisme untuk menciptakan kesejahteraan kolektif. Zakat mal membantu mengalirkan dana dari individu kaya kepada masyarakat miskin, yang secara langsung mengurangi kesenjangan sosial. Ini adalah bagian dari konsep ekonomi yang lebih luas, yaitu keberlanjutan ekonomi yang adil, di mana setiap individu memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi. Menurut Ali (2020), zakat berfungsi sebagai instrumen sosial yang menyatukan kekuatan ekonomi masyarakat, dengan tujuan agar seluruh anggota masyarakat dapat menikmati kemakmuran.

Dalam hal ini, zakat mal menjadi salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut⁴. Sistem zakat yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, yang pada gilirannya memperbesar dampak positif yang dihasilkan. Penyaluran zakat yang tepat sasaran akan memberikan manfaat yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan,

³ Mannan, M. A. "Zakat: The Islamic Solution for Economic Justice," *Journal of Islamic Social Sciences*, 8, no. 2 (2019): 112-130

⁴ Ali, M. "Zakat as a Tool for Economic Development in Islamic Society," *Journal of Islamic Economics*, 15, no. 2 (2020): 98-112

menciptakan peluang ekonomi bagi mereka yang membutuhkan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Sadiq, 2018).

C. Lembaga Amil Zakat dan Peran Pemerintah

Lembaga amil zakat memegang peran yang sangat krusial dalam implementasi zakat mal, baik dari segi pengumpulan maupun distribusi zakat kepada yang berhak menerimanya⁵. Sebagai lembaga pengelola zakat, amil zakat harus dapat memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Untuk itu, lembaga amil zakat perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolannya, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian kepada penerima yang memenuhi syarat (Aziz, 2017). Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat sangat bergantung pada sejauh mana lembaga ini dapat mengelola dana zakat dengan jujur dan efektif. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur zakat, tetapi juga sebagai penghubung antara donatur dan mustahiq (penerima zakat). Pendidikan mengenai zakat yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Sulaiman, 2019).

Pemerintah juga memegang peran vital dalam mendukung implementasi zakat mal. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk memastikan sistem zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga untuk menciptakan kebijakan dan regulasi yang memfasilitasi pengumpulan dan pendistribusian zakat⁶. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi individu atau perusahaan yang membayar zakat, seperti potongan pajak atau pengurangan kewajiban pajak, untuk mendorong partisipasi aktif dalam sistem zakat. Pemerintah juga dapat membantu lembaga amil zakat dalam hal pengawasan dan regulasi, sedangkan lembaga amil zakat dapat memberikan informasi yang berguna mengenai penerima zakat yang tepat. Hal ini akan memastikan bahwa dana zakat benar-benar digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan syariah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik, implementasi zakat mal dapat berjalan dengan lancar dan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, diharapkan kontribusi zakat dari masyarakat akan semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam konteks implementasi hukum zakat mal dalam sistem ekonomi Islam dapat dikaji melalui pendekatan studi pustaka. Studi pustaka memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mengidentifikasi kerangka konseptual, mengkompilasi hasil-hasil penelitian terdahulu, serta menganalisis pandangan para ahli terkait implementasi zakat mal. Dengan merinci literatur-

⁵ Sadiq, H. "The Impact of Zakat on Economic Justice in Muslim Communities," *Journal of Islamic Social Thought*, 7, no. 4 (2018): 205-222

⁶ Aziz, M. "The Role of Zakat Management Institutions in Islamic Societies," *Journal of Islamic Finance*, 10, no. 1 (2017): 45-60

literatur yang mengulas aspek hukum, ekonomi, dan sosial dari zakat mal, penelitian ini dapat menyusun basis pengetahuan yang kokoh untuk mengarahkan analisis lebih lanjut terhadap peran lembaga amal zakat, peran pemerintah, edukasi masyarakat, dan inovasi dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan implementasi zakat mal dalam mencapai tujuan ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

Pembahasan Implementasi Hukum Zakat Mal Dalam Sistem Ekonomi Islam menggambarkan kompleksitas integrasi prinsip-prinsip syariah dengan hukum positif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pada tingkat hukum positif, beberapa negara dengan basis hukum Islam telah mengadopsi dan mengimplementasikan undang-undang zakat mal. Meskipun demikian, tantangan utama muncul dalam menyelaraskan kerangka hukum positif dengan tuntutan syariah.

Sebagai contoh, di beberapa negara, zakat mal mungkin diatur oleh lembaga-lembaga keuangan Islam yang bekerja di bawah payung otoritas keuangan konvensional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan kemandirian lembaga amal zakat dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengaruh hukum positif dalam hal ini perlu dipelajari lebih lanjut untuk memahami sejauh mana zakat mal dapat diintegrasikan dengan baik dalam sistem keuangan yang umumnya didominasi oleh aturan konvensional.⁷

Selain itu, peran pemerintah dalam mendukung implementasi hukum zakat mal sangat signifikan. Dalam banyak kasus, pemerintah dapat menciptakan insentif pajak atau memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan atau individu yang memenuhi kewajiban zakat mal. Namun, perlu dievaluasi sejauh mana peran pemerintah ini konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dan sejauh mana insentif tersebut dapat mendorong partisipasi aktif dalam membayar zakat mal tanpa mengorbankan integritas syariah.

Di sisi lain, aspek syariah dalam implementasi zakat mal juga merupakan bagian penting dari pembahasan. Peran lembaga-lembaga keagamaan dan ahli syariah dalam mengawasi pelaksanaan zakat mal, menentukan kriteria penerima zakat, dan memastikan dana disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi fokus penting. Keberlanjutan dan efektivitas zakat mal dalam mencapai tujuan ekonomi Islam tergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip syariah ditegakkan dalam setiap tahapan prosesnya.

Edukasi masyarakat juga menjadi elemen integral dalam pembahasan ini. Pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terkait zakat mal, serta kesadaran akan dampak positif yang dapat dihasilkan, dapat memperkuat implementasi ini. Oleh karena itu, program edukasi yang terarah dan komprehensif perlu dikembangkan untuk memberikan pengetahuan yang cukup kepada

⁷Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26-51.

masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran dalam sistem zakat mal.

Selain itu, aspek inovasi dalam implementasi zakat mal juga perlu diperhatikan. Dalam menghadapi dinamika ekonomi modern, teknologi dan metode baru dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat mal. Implementasi teknologi keuangan Islam dan platform digital dapat mempermudah proses zakat mal, meningkatkan transparansi, dan mengurangi biaya administratif.

Secara keseluruhan, pembahasan implementasi hukum zakat mal dalam sistem ekonomi Islam melibatkan sinergi antara hukum positif dan syariah, keterlibatan pemerintah, peran lembaga-lembaga keagamaan, edukasi masyarakat, dan penerapan inovasi. Dengan mendalaminya, kita dapat memahami kompleksitas dinamika yang terlibat dan mengidentifikasi cara-cara untuk memperkuat implementasi zakat mal sebagai instrumen ekonomi Islam yang efektif dan berkelanjutan.⁸

KESIMPULAN

Dalam menjalankan implementasi hukum zakat mal dalam sistem ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang bersama-sama membentuk lanskap yang kompleks. Secara global, beberapa negara dengan dasar hukum Islam telah berusaha mengintegrasikan zakat mal ke dalam kerangka hukum positif mereka. Namun, sejauh mana integrasi ini berlangsung secara efektif memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan konsistensi dengan prinsip-prinsip syariah tanpa mengorbankan efisiensi dan keberlanjutan.

Peran lembaga amal zakat dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat mal sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi. Meskipun hukum positif dapat memberikan landasan untuk keberadaan lembaga-lembaga ini, independensi dan kemandirian mereka dalam mengikuti prinsip-prinsip syariah perlu diperkuat. Keterlibatan pemerintah sebagai penyokong utama dalam memberikan insentif dan menciptakan kebijakan yang mendukung peran lembaga amal zakat merupakan kunci untuk mencapai tujuan ekonomi Islam.

Dalam konteks syariah, peran lembaga keagamaan dan ahli syariah dalam mengawasi implementasi zakat mal sangat krusial. Kriteria penentuan penerima zakat dan mekanisme distribusi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tujuan ekonomi Islam dapat tercapai. Edukasi masyarakat juga memegang peran vital, karena pemahaman yang lebih baik tentang zakat mal dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dan bertanggung jawab dari masyarakat.

Hukum positif turut memainkan peran penting dalam memberikan dasar hukum bagi implementasi zakat mal. Namun, perlu dilakukan kajian mendalam tentang konsistensi antara hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah untuk

⁸Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100-120.

memastikan bahwa mekanisme yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa mengorbankan keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Aspek inovasi juga memegang potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi implementasi zakat mal. Pemanfaatan teknologi dan metode baru dapat mempermudah proses pengumpulan zakat mal, meminimalkan biaya administratif, dan meningkatkan kecepatan distribusi dana.

Dengan melihat gambaran menyeluruh atas implementasi hukum zakat mal, dapat diambil kesimpulan bahwa sinergi antara hukum positif, syariah, pemerintah, lembaga keagamaan, edukasi masyarakat, dan inovasi sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara luas. Hanya melalui pendekatan holistik ini, implementasi zakat mal dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan ekonomi dalam perspektif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2020). The Role of Zakat in Islamic Economics. *Journal of Islamic Economic Studies*, 12(3), 45-67
- Ali, M. (2020). Zakat as a Tool for Economic Development in Islamic Society. *Journal of Islamic Economics*, 15(2), 98-112.
- Aziz, M. (2017). The Role of Zakat Management Institutions in Islamic Societies. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 45-60
- Mannan, M. A. (2019). Zakat: The Islamic Solution for Economic Justice. *Journal of Islamic Social Sciences*, 8(2), 112-130
- Sadiq, H. (2018). The Impact of Zakat on Economic Justice in Muslim Communities. *Journal of Islamic Social Thought*, 7(4), 205-222
- Suherman, D. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui badan amil zakat nasional kabupaten Garut tahun 2019. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 67-76.
- Sulaiman, A. (2019). Government and Zakat: A Study on the Role of Public Policy in Zakat Distribution. *Journal of Islamic Public Policy*, 13(3), 115-130
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26-51.
- Panjaitan, K. S., Khairunisah, K., & Jannah, N. (2023). Implementasi Zakat Maal secara Produktif, Solusi Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 1448-1459.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100-120.